

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntansi Keuangan (Pemerintahan) daerah di Indonesia merupakan salah satu bidang dalam akuntansi sektor publik yang mendapat perhatian besar dari berbagai pihak semenjak Reformasi Tahun 1998. Hal tersebut disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari pemerintah Republik Indonesia yang “mereformasi” berbagai hal, termasuk pengelolaan keuangan daerah. Reformasi tersebut awalnya dilakukan dengan mengganti Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah dengan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, dan UU Nomor 32 Tahun 1956 mengenai Keuangan Negara dan Daerah (Halim,2008:01).

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia (Depdagri) melalui Kep.Mendagri nomor 29 tahun 2002 yang sekarang di perbaharui menjadi peraturan menteri dalam negeri (Per.mendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman keuangan pengelolaan keuangan daerah memberikan implikasi yang cukup bermakna bagi pemerintah daerah untuk provinsi maupun kabupaten kota. Dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik khususnya dalam penyelenggaraan otonomi daerah, maka pengelolaan keuangan daerah perlu dilaksanakan secara profesional transparan dan tanggung jawab. Hal ini sebagaimana telah diatur dan ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara mengamanatkan negara kepada pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) selaku pengguna anggaran untuk

menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggung jawaban pengelolaan keuangan daerah.

Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No.25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi tonggak dimulainya Otonomi Daerah. Otonomi Daerah merupakan upaya pemberdayaan daerah dalam pengambilan keputusan daerah secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan, prioritas, dan potensi daerah itu sendiri. Dengan pemberian Otonomi Daerah Kabupaten dan Kota, pengelolaan keuangan sepenuhnya berada ditangan Pemerintah Daerah (Halim,2008:01).

Di sisi lain tuntutan akan terbentuknya *good governance* sudah menjadi kehendak bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Untuk menjawab tuntutan tersebut, pemerintah terus berupaya untuk bersikap lebih transparan dalam pertanggungjawaban publiknya. Sebagai upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah adalah penyampaian laporan pertanggung-jawaban keuangan pemerintah yang memenuhi prinsip tepat waktu dan dapat di gabungkan (*reliable*) serta disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diterima secara umum. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah N0.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Bastian,2006:04).

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tersebut, SKPD diberikan alokasi dana (anggaran). Oleh karena

itu, kepala SKPD disebut juga Pengguna Anggaran (PA). SKPD dalam hal ini disebut pula selaku entitas akuntansi dimana sebagai pengguna anggaran/pengguna barang, maka wajib untuk membuat/menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepala SKPD.

Berdasarkan uraian latar belakang dimuka, maka penulis mengambil judul mengenai “Proses Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan kabupaten sumenep?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh dinas kesehatan dalam melakukan proses dan penyusunan laporan keuangan tersebut ?

1.3 Tujuan

Secara umum tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui implementasi penyusunan laporan keuangan dinas kesehatan kabupaten sumenep
- b) Untuk mengetahui kendala kendala apa saja yang dihadapi oleh Dinas kesehatan .dalam melakukan proses dan penyusunan laporan keuangan tersebut.

1.4 Manfaat

Manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari penulisan ini adalah:

- a. Diharapkan hasil penulisan ini dapat dijadikan bekal dan pengalaman dalam menganalisis suatu masalah dan berguna untuk penulisan lebih lanjut .

- b. Diharapkan hasil penulisan dapat memberikan masukan pada pihak Dinas Kesehatan Sumenep untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam proses penyusunan laporan keuangan .

1.5 Waktu dan Lokasi Penulisan

Sesuai dengan fokus penulisan yang dilakukan, untuk mendukung akurasi data penulisan, maka penulis menentukan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumenep sebagai pemilihan lokasi penulisan. Penulis melakukan Kerja Praktek ini selama 1 bulan terhitung dari tanggal 05 Januari – 05 Pebruari 2014